

Matrik Rencana Aksi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Perangkat Daerah: Kecamatan Purbalingga
Evaluator: Mardawati

No	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
1	Rancangan Awal Renja Tahun 2026 telah disusun, namun terdapat Data-data belum relevan	Memperbaiki Ranwal Renja 2026 sesuai ketentuan	Melakukan Pembahasan Penyusunan Renja 2026 dengan melibatkan seksi-seksi terkait, sehingga yang ada di renja Valid dan relevan	Oktober 2025	1. Bukti Pembahasan Penyusunan Ranwal Renja 2026 dengan semua seksi-seksi terkait 2. Dokumen Rancangan Renja 2026 yang sudah fix	https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu
2	Dokumen yang disusun belum seluruhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, di mana dokumen perencanaan yang disusun tidak sesuai ketentuan dan terdapat ketidakselarasan antar dokumen perencanaan : □Terdapat Sub Kegiatan yang tercantum dalam renja, cascading, DPA tahun 2025 akan tetapi belum tercantum dalam Perjanjian Kinerja eselon IV tahun 2025. □Terdapat Sub Kegiatan yang tercantum dalam renja, cascading, DPA tahun 2025 akan tetapi belum tercantum dalam Rencana Aksi 2025. □Terdapat sub kegiatan yang tidak tercantum pada cascading namun terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2025 seperti Fasilitasi kunjungan tamu	Memperbaiki dokumen-dokumen perencanaan Tahun 2025 dan pada masa yang akan datang agar memperhatikan keselarasan antar dokumen dalam penyusunan dokumen perencanaan	Menyesuaikan dan Menyelaraskan dokumen tahun 2025, selanjutnya kedepannya dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk menyelaraskan semua dokumen yang ada	Oktober 2025	1. Bukti Dokumen yang sudah diselaraskan 2. Surat pernyataan dalam Menyusun dokumen perencanaan akan memperhatikan keselarasan saatu dengan yang lainnya	https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu
3	Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis nyusunan pohon kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja yaitu: □Belum terbentuk ultimate outcome yaitu Indikator kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik berupa IPP pada Pohon Kinerja, di mana IPP berada di bawah indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan (IKM), sedangkan IKM merupakan instrumen dari IPP. □Terdapat pengulangan (redundansi) dalam menuangkan CSF contohnya pada CSF Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja. □Belum terbangun kerangka berfikir logis (logical framework). Pada Pohon Kinerja □Indikator tidak SMART yaitu pada indikator nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik); □Sudah dihubungkan dengan dokumen perencanaan;	Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis dan langkah-langkah penyusunan pohon kinerja;	1. Melakukan Pembahasan Penyusunan Pohon Kinerja Resntra 2025-2029 dengan bidang-bidang terkait 2. Menuangkan Pohon kinerja dalam dokumen Perencanaan Kinerja	Oktober 2025	1. Bukti Pembahasan Pohon Kinerja dengan bidang terkait 2. Dokumen Pohon kinerja 3. Dokumen Perencanaan (Renstra 2025-2029)	https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu
4	Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja yaitu masih ada target Kinerja Tahun 2024 tidak tercapai	Pengukuran kinerja agar dijadikan sebagai strategi mencapai kinerja, sebagai acuan kebijakan pimpinan, maupun penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja agar target-target kinerja yang telah ditetapkan bisa tercapai	Melakukan pendalaman Evaluasi Kinerja Internal serta menganalisis strategi yang diperlukan sehingga semua target tercapai	Oktober 2025	Surat Pernyataan Camat akan melakukan pendalaman Evaluasi untuk menganalisis strategi untuk meningkatkan kinerja kecamatan	https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu

	Belum dilakukan presensi secara elektronik (sebagaimana diamanatkan oleh perbup TPP) dan belum dilakukan evaluasi atas tidak adanya presensi pegawai	Segera melaksanakan pengadaan Absensi elektronik pengganti yang rusak sehingga seluruh pegawai bisa melakukan absensi elektronik sebagaimana diamanatkan oleh perbup TPP;	Pengusulan Pengadaan Alat Presensi Elektronik	Oktober 2025	Surat pernyataan Menyanggupi Pengadaan alat presensi	https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu
5	Presensi elektronik dan pengukuran kinerja belum dijadikan pertimbangan sebagai reward ataupun punishment dalam pemberian TPP	Menggunakan data Presensi elektronik dan hasil pengukuran kinerja dalam meningkatkan pengendalian terhadap mekanisme pemberian penghargaan (<i>Reward and Punishment</i>) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian Tambahan Penhasilan Pegawai	Laporan form A6	Oktober 2025	Bukti Pemotongan TPP bagi yang tidak melaksanakan presensi sesuai ketentuan	https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu
6	Aplikasi Pengukuran Kinerja yang tersedia pada https://e-sakip.purbalinggakab.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi	Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia yakni E-SAKIP (sakip.purbalinggakab.go.id) dan E-Kinerja (e-kinerja.purbalinggakab.go.id), untuk peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi.	Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran kinerja dengan mengunggah dokumen-dokumen yang bisa menjadi konsumsi publik di aplikasi	Oktober 2025	1. Surat Pernyataan Camat akan menggunakan Aplikasi secara optimal 2. Bukti ScreenShoot telah di ungguh	https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu
	Terdapat ketidakkonsistenan pada Nilai kematangan Perangkat Daerah target pada PK Perubahan Tahun 2024 sebesar 34, pada tabel capaian IKU tahun 2024 pada LKJIP tahun 2024, target maupun realisasi nya 33.	Memperbaiki materi/isi LKJIP Kecamatan Purbalingga agar semua data selaras	Memperbaiki Tabell Capaian IKU	Oktober 2025	Tabel capaian IKU	https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu
7	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, sudah terdapat inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja LKJIP namun belum digunakan secara maksimal	Menjadikan informasi LKJIP Kecamatan Purbalingga Tahun 2024 sebagai penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja pada tahun berikutnya dengan menyempurnakan dan memaksimalkan Inovasi yang sudah ada	Menggunakan Inovasi dalam mendukung Budaya kerja organisasi secara maksimal	Oktober 2025	Surat pernyataan untuk menggunakan Inovasi dalam pencapaian budaya kerja	https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu
8	LKJIP Belum menjelaskan secara mendalam faktor penyebab kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta belum menjelaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang paling mengungkit kinerja	Pada masa yang akan datang agar menyajikan isi dari LKJIP mengenai faktor penyebab kegagalan (jika target tidak tercapai) dalam pencapaian kinerja organisasi serta menjelaskan Kegiatan dan Sub Kegiatan apa yang paling mengungkit kinerja	Melakukan Evaluasi dan Pembahasan Bersama terhadap Faktor Kegagalan (tidak tercapai)dalam pencapaian Kinerja organisasi	Oktober 2025	Bukti dilaksanakan evaluasi	https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu
9	rekomendasi atas laporan Evaluasi AKIP tahun 2024 tidak ditindak lanjuti secara konsisten yang berulang pada evaluasi AKIP Tahun 2025 yaitu penilaian kinerja pegawai belum dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward and punishment (TPP)</i>	menindaklanjuti seluruh rekomendasi Lapporan Evaluasi AKIP tahun 2025 serta memastikan tidak terjadi pengulangan temuan di masa yang akan datang	1. Melakukan Evaluasi terhadap penilaian Kinerja 2. Menetapkan Reward dan Punishment bagi ASN yang memang tidak melaksanakan presesnsi sesuai Ketentuan berlaku	Oktober 2025	1. Surat Pernyataa n Camat Purbalingga bahwa akan melakukan evaluasi terhadap temuan berulang dan konsisten menidaklanjutinya 2. Bukti penetapan Reward dan punishment terhadap ASN terhadap pelaksanaan presensi Bukti Reward dan punishment sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu https://drive.google.com/drive/folders/1jdxM7q1EC7Zyjq5T5ieCmBANxtuJHfxu